

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
( Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)  
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis



OLEH:

**DEVI NANDA DWI OKTAVIAN**

NPM : 16.1.02.01.0016

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

**UN PGRI KEDIRI**

**2020**

Skripsi oleh :

**DEVI NANDA DWI OKTAVIAN**

NPM : 16.1.02.01.0016

Judul :

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
(Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur).**

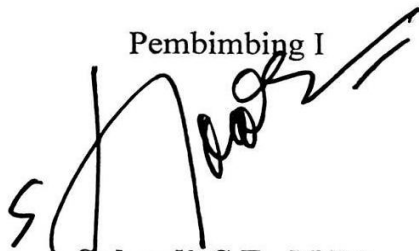
Telah disetujui untuk diajukan kepada

Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri

Tanggal : 22 Juli 2020

Pembimbing I



**Suhardi, S.E., M.Pd.**

NIDN : 0701105804

Pembimbing II



**Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si, Ak,CA**

NIDN :0710106402

Skripsi oleh :

**DEVI NANDA DWI OKTAVIAN**

NPM : 16.1.02.01.0016

Judul :

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
(Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur).**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri

Pada tanggal : 27 Juli 2020

**Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia Penguji :

1. Ketua : Suhardi, M.Pd
2. Penguji I : Sigit Wisnu SB, M.M
3. Penguji II : Dra. Puji Astuti, M.M, M.Si, Ak, CA



Mengetahui,  
Dekan FEB  
  
Drs. Subagyo, M.M.  
NIDN. 0717066601

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Devi Nanda Dwi Oktavian

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl. Lahir : Trenggalek, 12 Oktober 1997

NPM : 16.1.02.01.0016

Fak/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 21 Agustus 2020

Yang menyatakan



**DEVI NANDA DWI OKTAVIAN**

NPM : 16.1.02.01.0016

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Hanya ada 3 waktu*

*Pertama hari kemarin sebagai pembelajaran*

*Kedua hari ini sebagai tindakan*

*Ketiga hari besok sebagai harapan*

*Jalani, Nikmati, dan Syukuri.*

### **Kupersembahkan Karya Ini Untuk :**

Kedua Orang Tuaku bapak Yaeran dan ibu Pasri

Seluruh Keluargaku

Ponakan Terguuanteng Qiannu \*Makasih Udah Jadi Penghilang Penat\*

Seluruh Teman-Teman Se-Angkatan

Seluruh Teman-Teman HIMAKASI

Konco Ngebut & Konco Begadang Epo Dan Mudah

Dan untuk semuanya yang sudah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## Abstrak

**Devi Nanda Dwi Oktavian:** Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur), Skripsi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri, 2020.

Kata Kunci: Pajak daerah, Dana alokasi umum, Belanja modal, Kinerja keuangan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat potensi dan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbeda sehingga penerimaan pendapatan setiap daerah berbeda. Sumber keuangan asli daerah yang seharusnya menjadi sumber keuangan utama daerah, namun ternyata jumlah DAU yang besar memicu adanya ketergantungan daerah pada pusat. Ditambah dengan perencanaan keuangan APBD pemda yang kurang ideal menjadikan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran APBD belum optimal.

Penelitian ini menggunakan variabel pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal sebagai variabel independen dan variabel kinerja keuangan sebagai variabel dependen, dengan pendekatan penelitian kuantitatif termasuk jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga didapatkan 76 sampel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Prosedur pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan berupa dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu (1) pajak daerah berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan, (2) DAU berpengaruh namun secara negatif pada kinerja keuangan, (3) kegiatan belanja modal tidak berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja keuangan.

Rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini yaitu (1) pemda harus lebih mengembangkan sektor perekonomian agar penerimaan pajak daerah meningkat, (2) pemda harus lebih intensif dalam penggunaan dan pengelolaan DAU untuk kegiatan yang memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, (3) pemda harus lebih memaksimalkan penggunaan aset yang sudah ada serta harus lebih meningkatkan kualitas SDM untuk pengelolaannya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”** ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi UN PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.
2. Dr. Subagyo, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Suhardi, S.E., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat.

7. Kedua orang tua dan keluargaku yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik dalam bentuk material maupun spiritual.
8. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan tegur, sapa, kritik, dan saran-saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi samudra luas.

Kediri, 16 Juli 2020



**DEVI NANDA DWI OKTAVIAN**

NPM : 16.1.02.01.0016



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II : KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori.....	11

1. Pajak Daerah.....	11
2. Dana Alokasi Umum .....	24
3. Belanja Modal .....	26
4. Kinerja Keuangan.....	30
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Berfikir .....	41
D. Kerangka Konseptual .....	43
E. Hipotesis .....	44
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Variabel Penelitian .....	45
1. Identifikasi Variabel Penelitian .....	45
2. Definisi Operasional Variabel .....	46
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian.....	48
1. Pendekatan Penelitian.....	48
2. Teknik Penelitian.....	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
1. Tempat Penelitian .....	49
2. Waktu Penelitian .....	49
D. Populasi dan Sampel .....	50
1. Populasi .....	50
2. Sampel .....	50

E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Sumber Data .....	52
2. Langkah-Langkah Pengumpulan Data .....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
1. Jenis Analisi Data .....	53
2. Uji Hipotesis .....	59
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	63
1. Geografi.....	63
2. Pemerintahan .....	63
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	63
4. Sosial .....	64
B. Deskripsi Data Variabel.....	65
1. Variabel Independen.....	65
a. Pajak Daerah .....	65
b. Dana Alokasi Umum .....	68
c. Belanja Modal .....	70
2. Variabel Dependen .....	72
C. Analisis Data dan Interpretasi .....	76
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	76
a. Hasil Uji Normalitas .....	76

b. Hasil Uji Multikolinearitas .....	81
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	82
d. Hasil Uji Autokorelasi .....	83
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	85
3. Koefisien Determinasi .....	88
D. Pengujian Hipotesis .....	89
1. Uji t (Uji Parsial) .....	89
2. Uji F (Uji Simultan).....	92
E. Pembahasan .....	94
1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan .....	94
2. Pengaruh DAU Terhadap Kinerja Keuangan .....	95
3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan .....	96
4. Pengaruh Pajak Daerah, DAU, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan .....	97
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
A. Simpulan.....	99
B. Implikasi .....	99
1. Implikasi Teoritis.....	99
2. Implikasi Praktis .....	101
C. Saran .....	101

**DAFTAR PUSTAKA .....103**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....107**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tolak ukur derajat desentralisasi fiskal .....	31
Tabel 2.2 Tolak ukur ketergantungan keuangan daerah .....	32
Tabel 2.3 Tolak ukur kemandirian keuangan daerah .....	33
Tabel 2.4 Tolak ukur rasio efektivitas PAD .....	34
Tabel 2.5 Tolak ukur rasio efisiensi PAD .....	34
Tabel 2.6 Hasil penelitian terdahulu .....	39
Tabel 3.1 Daftar nama kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur .....	51
Tabel 3.2 Pengambilan keputusan uji autokorelasi.....	57
Tabel 3.3 Pedoman interpretasi koefisien determinasi .....	59
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018 .....	66
Tabel 4.2 Realisasi DAU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2017- 2018 .....	68
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018 .....	70
Tabel 4.4 Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2018.....	73
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	80
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas .....	81
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i> .....	84
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	86
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi .....	88
Tabel 4.10 Koefisien Regresi .....	90
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	92
Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Analisis .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	43
Gambar 4.1 Hasil Grafik Histogram .....	78
Gambar 4.2 Hasil Normal <i>Probability Plot</i> .....	79
Gambar 4.3 Hasil Grafik <i>Scatterplot</i> .....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tabulasi Data.....	107
Lampiran 2 Hasil Output SPSS.....	113
Lampiran 3 Berita Acara Kemajuan Pembimbingan .....	117



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Secara *etimologi*, istilah “otonomi daerah” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” dan “*nomos*” yang artinya “sendiri” dan “aturan”. Sehingga definisi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sebagai bagian dari desentralisasi, termasuk upaya menggali sumber keuangan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD). PAD digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan daerahnya sehingga ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat diminimalkan.

Pengertian pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah salah satu elemen dari pendapatan APBD selain dari dana perimbangan. Pajak daerah bersumber dari berbagai jenis pajak sebagaimana tercantum di UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 sebagai berikut “Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan”.

Variabel lainnya yang akan diteliti dalam penelitian ini selain pajak daerah sebagai salah satu pendapatan APBD, yaitu dana alokasi umum yang merupakan salah satu dari elemen dana perimbangan. Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 47 menyatakan Dana

Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan harapan agar dapat mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dan mendorong kemandirian pemerintah daerah. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Variabel lainnya yang akan diteliti adalah belanja modal, salah satu pengeluaran APBD. Menurut Erliana (2015:155) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kegiatan dari belanja modal juga berpengaruh terhadap pendapatan keuangan daerah jika pengalokasiannya tepat dan dikelola secara optimal dan efektif karena belanja modal diartikan sama dengan daerah melakukan kegiatan investasi. Belanja modal pemerintah kabupaten/kota dapat diklasifikasikan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Namun dalam pelaksanaan, otonomi daerah mengalami kendala yaitu kesiapan daerah baik tingkat potensi dan kemampuan setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerah berbeda-beda, ditambah lagi dengan kualitas

maupun kuantitas SDM yang berbeda juga. Mengakibatkan jumlah pendapatan terutama PAD setiap daerah berbeda, untuk daerah yang tingkat potensi daerahnya tinggi maka akan menguntungkan sebaliknya untuk tingkat potensi daerah yang rendah akan merugikan, yang merupakan salah satu dampak dari diberlakukannya otonomi daerah. Selain PAD pemerintah daerah juga menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat salah satunya DAU. Besarnya jumlah dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati dalam Farisi, 2015).

Variabel selanjutnya yang akan menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kemampuan suatu daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tercermin dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya (Antari, 2018). Abdullah (2015) menyatakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang baik maka akan memberi kontribusi yang baik dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Dalam praktek penyusunan dan perencanaan laporan keuangan pemerintah daerah masih mengalami kendala antara lain perencanaan

keuangan pemerintah daerah yang dinilai kurang ideal seiring dengan porsi belanja pegawai yang mendominasi ketimbang belanja modal, menurut penelitian *Institute For Development Of Economics And Finance (Indef)* Rusli Abdullah menilai penggunaan APBD masih cenderung berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan bukan pembangunan yang berdampak pada perekonomian. Ditambah lagi acara kunjungan kerja komite IV DPD dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2019 di Sidoarjo pada Selasa (22/10/2019), yang menyatakan ada 3 pemerintah daerah di Jawa Timur yang mendapat sorotan DPD RI terkait laporan keuangan yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiguna (2019) untuk variabel pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2012-2016, yang berarti kontribusi pajak daerah yang diterima masih sangat kecil. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Farisi (2015) yang menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, artinya semakin besar penerimaan pajak daerah maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2017) menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013-2015, yang berarti semakin besar pendapatan pajak daerah akan meningkatkan

sumber pendapatan asli daerah yang akan sangat mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan Abdullah (2015) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013, artinya pola manajerial pemerintah daerah tidak mempertimbangkan DAU sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2020) yang menunjukkan bahwa secara parsial DAU bagian dari dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY tahun anggaran 2013-2018. Dapat disimpulkan semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh daerah menunjukkan ketidakmandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.

Penelitian terhadap variabel belanja modal yang dilakukan oleh Andirfa (2016) menunjukkan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, artinya semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2017) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2015. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menunjukkan bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2013-2015, yang artinya kenaikan belanja modal maka akan mengurangi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul untuk penelitian sebagai berikut :

**“Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tingkat potensi dan kemampuan setiap daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang berbeda-beda, terutama sumber daya ekonominya yang mengakibatkan tingkat pendapatan setiap daerah berbeda.
2. Adanya ketergantungan pemerintah daerah pada DAU yang diberikan pemerintah pusat yang masih merupakan sumber pendapatan terbesar daerah dibandingkan dengan PAD.
3. Perencanaan keuangan pemerintah daerah yang dinilai kurang ideal seiring dengan porsi belanja pegawai yang mendominasi ketimbang belanja modal. Penggunaan APBD masih yang cenderung berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan bukan pembangunan yang berdampak pada perekonomian.

4. Tata kelola keuangan di beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur memburuk, dengan mendapat penilaian wajar dengan pengecualian pada hasil pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2019.
5. Masih belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran dana APBD di beberapa pemerintah daerah sehingga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **C. PEMBATASAN MASALAH**

Agar penelitian lebih terarah dan mempermudah dalam menganalisis, maka penulis memberikan batasan penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menguji pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Peneliti memilih objek penelitian yaitu laporan realisasi anggaran (LRA) APBD kabupaten/kota pada tahun anggaran 2017-2018 di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam situs website resmi [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur ?



3. Apakah belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur ?
4. Apakah pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur ?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pajak daerah terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur.

#### **F. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang dan menambah ilmu serta pengetahuan tentang bagaimana kinerja

keuangan pemerintah daerah dilihat dari segi pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak lain untuk mensejahterakan masyarakatnya dari segi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menyediakan sarana dan prasarana publik yang layak untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Dri A.S., dan Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi*, (online), 3:1, tersedia : (<http://repository.unib.ac.id/11577/>), diunduh 10 Maret 2020.
- Andirfa, M., Hasan, B., dan Shabri, A.M. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, (online), 5:3, tersedia : (<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4523>), diunduh 12 Maret 2020.
- Antari, N.P.G.S, dan Ida, B.P.S. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, (online), 7:2, tersedia : (<http://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>), diunduh 10 Maret 2020.
- Bisma, I Dewa Gede dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007. *Jurnal GeneÇ Swara Edisi Khusus*, (online), 4:3, tersedia : (<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma.pdf>), diunduh 25 Maret 2020.
- Erlina, Omar, S.R., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta : Salemba Empat.
- Farisi, S. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Artikel Ilmiah FE UNP*, (online), tersedia : (<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1651/1274>) diunduh 9 Maret 2020.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Herisistam. 2015. *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Jakarta : UT Perpustakaan Digital.
- Ismiyati. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016). Skripsi. Tidak dipublikasikan. Kediri: FE UNP.
- BPS Jatim, IPDS. 2019. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019*. Jawa Timur : BPS Provinsi Jawa Timur.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto .W. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmentalrevenue*, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, (online), 15:1, tersedia : (<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/1379>), diunduh 11 Maret 2020.

- Prastiwi, Nanda .D, dan Andri Waskita A. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, (online), 28:1, tersedia : (<http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/issue/view/4>), diunduh 11 Maret 2020.
- Sari, Renita .N. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Simki-Economic*, (online), tersedia : ([http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/a32677813a0762bdd5b8b706c453e46b.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/a32677813a0762bdd5b8b706c453e46b.pdf)), diunduh 30 Maret 2020.
- Siahaan, Marihot.P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009*. Edisi Revisi Cetakan ke 4. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 23. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Wiguna, K.A, dan I Ketut, J. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, (online), 28:1, tersedia : (<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04>), diunduh 10 Maret 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (online), tersedia : <http://www.djpk.depkeu.go.id>, diunduh 9 Maret 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan (online), tersedia : <http://www.djpk.depkeu.go.id>, diunduh 10 Maret 2020.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (online), tersedia : <http://www.bpkp.go.id>, diunduh 10 Maret 2020.

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (online), tersedia : <https://www.atrbpn.go.id>, diunduh 9 Maret 2020.

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* Direktorat Jendral Pajak (Online), tersedia : <https://pajak.go.id>, diunduh 20 Mei 2020.

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (online), tersedia : <https://www.atrbpn.go.id>, diunduh 9 Maret 2020.

*Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Indonesia.* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (online), tersedia : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, diunduh 9 Maret 2020.